Dinamis: Jurnal Inovasi dan Transformasi Pendidikan
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 1423 - 1437
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Dinamis/article/view/621
E-ISSN: 3124-8926

DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM ERA KHULAFAUR RASYIDIN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN MODERN

Rizki Inggriani[1], Andi Mirda Ningsih A.M[2], Idrus L.[3]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *rizkiinggriani@gmail.com[1*]*, *andimirdaa@gmail.com[2]*, *idruslatif.iainbone@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *30 September 2026*
Revised : *13 Oktober 2026*
Accepted: *29 Oktober 2026*
Published: *11 November 2026*

Keywords: *educational policy, Khulafaur Rasyidin, teacher management, Islamic education, curriculum standardization.*

Abstract
The death of the Prophet Muhammad (peace be upon him) placed the Muslim community in a new situation: the source of direct authority was no longer present, while the territory and number of Muslims continued to expand. During the period of the Rightly Guided Caliphs (Khulafaur Rasyidin), Islamic education was maintained and developed through policies that responded to the needs of each period. This article aims to examine educational policies during the leadership of Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, and Ali ibn Abi Talib, and to analyze their relevance to modern education. This study employs a library research approach with descriptive-critical analysis of primary sources, including hadith and classical historical works, as well as secondary sources consisting of books and scholarly journals. The findings indicate that each caliph emphasized different aspects, namely the preservation of religious sources, the organization and equitable distribution of educators, the standardization of learning resources, and the preservation of scholarly traditions amid conflict. A critical examination of the sources shows that the organization of education during this period developed gradually and cannot be equated with a formal school system. These principles can be developed and applied in modern education, particularly in strengthening character education, ensuring equitable distribution of teachers, maintaining the quality of learning resources, and utilizing technology, without directly replicating the institutional forms of that period.

Kata Kunci*:* kebijakan pendidikan, Khulafaur Rasyidin, manajemen pendidik, Pendidikan Islam, standardisasi kurikulum.

Abstrak
Wafatnya Rasulullah saw. menempatkan umat Islam pada situasi baru: sumber otoritas langsung telah tiada, sementara wilayah dan jumlah pemeluk Islam terus bertambah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam bertahan dan berkembang melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan tiap zaman. Artikel ini bertujuan menelaah kebijakan pendidikan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, lalu menganalisis relevansinya bagi pendidikan modern. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan analisis deskriptif-kritis terhadap sumber primer berupa hadis dan kitab sejarah klasik, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa tiap khalifah menekankan aspek yang berbeda, yakni pemeliharaan sumber ajaran, penataan dan pemerataan pendidik, standardisasi sumber belajar, serta

penjagaan tradisi keilmuan di tengah konflik. Kajian kritis atas sumber memperlihatkan bahwa keteraturan pendidikan masa itu tumbuh bertahap dan tidak dapat disamakan dengan sistem sekolah formal. Prinsip-prinsip tersebut dapat dikembangkan dalam pendidikan modern, terutama untuk penguatan karakter, pemerataan guru, penjaminan mutu sumber belajar, dan pemanfaatan teknologi, tanpa menyalin bentuk kelembagaannya secara langsung.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam tidak lahir dari ruang kosong. Selama masa kenabian, Rasulullah saw. menjadi pendidik sekaligus pemimpin yang menerima wahyu, menjelaskannya, dan mencontohkannya secara langsung. Para sahabat belajar dari beliau melalui majelis di rumah Arqam bin Abi Arqam, di masjid, dan dalam kehidupan sehari-hari (Nata, 2022). Setelah Rasulullah saw. wafat, umat Islam menghadapi pertanyaan mendasar: bagaimana ajaran yang telah diterima dapat dijaga dan terus diajarkan tanpa kehadiran beliau.

Jawaban atas pertanyaan itu muncul pada masa Khulafaur Rasyidin. Para khalifah tidak hanya mengurus pemerintahan dan pertahanan, tetapi juga mengambil langkah yang menentukan arah pendidikan umat. Pengumpulan Al-Qur'an, pengiriman guru ke wilayah baru, dan penyeragaman mushaf adalah contoh kebijakan yang akibatnya masih terasa sampai sekarang. Karena itu, masa Khulafaur Rasyidin layak dipandang sebagai fase peletakan fondasi pendidikan Islam setelah masa kenabian (Rauf et al., 2025).

Kebijakan pendidikan pada masa itu penting karena menunjukkan bahwa pendidikan Islam dikelola sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan, bukan sekadar urusan pribadi. Ketika Islam meluas ke Syam, Irak, Persia, dan Mesir, kebutuhan akan guru, tempat belajar, dan rujukan yang seragam menjadi mendesak. Wilayah baru membawa penduduk yang baru memeluk Islam dan memerlukan pengajaran dasar agar keimanannya kokoh (Suryani & Dewi, 2024)

Pendidikan Islam masa kini menghadapi tantangan yang berbeda. Arus digitalisasi, globalisasi nilai, krisis karakter di kalangan peserta didik, kesenjangan mutu antardaerah, dan tuntutan kompetensi guru adalah persoalan yang kerap dibicarakan dalam dunia pendidikan Indonesia (Azra, 2019). Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum juga masih terasa di sebagian lembaga.

Atas dasar itu, mengkaji kebijakan pendidikan Khulafaur Rasyidin bukan sekadar mengenang sejarah. Kajian ini berupaya menemukan prinsip yang masih berguna: bagaimana pemimpin

merespons perubahan, menjaga kemurnian sumber belajar, dan memastikan ilmu sampai kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan kajian Rachman dan Widodo (2023) yang memandang bahwa pendidikan masa Khulafaur Rasyidin perlu dikontekstualisasikan untuk membantu menjawab masalah pendidikan Islam masa kini. Artikel ini menguraikan karakteristik pendidikan pada masa tersebut, menelaah kebijakan masing-masing khalifah, membandingkannya, kemudian menganalisis relevansi dan tantangan penerapannya dalam pendidikan modern.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memetakan pendidikan pada masa ini. Kosim, (2021)merangkum peran tiap khalifah, mulai dari kodifikasi Al-Qur'an oleh Abu Bakar, perluasan pendidikan oleh Umar, standardisasi bahasa Al-Qur'an oleh Utsman, hingga kesinambungan tradisi keilmuan pada masa Ali.Zebua et al., (2020), dan Toedien et al., (2025)menelusuri pola pendidikan tiap periode serta menarik pelajaran bagi pendidikan masa kini, sedangkan Dahlan et al., (2023) memusatkan perhatian pada masa Umar. Shohibatussholihah, (2022) dan Mulyani et al., (2023) menyoroti sistem pendidikan dan sumbangan Khulafaur Rasyidin pada periode klasik. Artikel ini menambahkan dua hal: pemisahan yang tegas antara fakta riwayat dan penafsiran analitis, serta pemetaan prinsip kebijakan para khalifah pada persoalan pendidikan modern yang konkret.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-kritis. Sumber primer yang dipakai ialah hadis tentang pengumpulan dan penyeragaman mushaf dalam Shahih al-Bukhari, serta kitab sejarah klasik seperti al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir, Tarikh al-Khulafa' karya As-Suyuthi, dan al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah tentang kebijakan pendidikan Khulafaur Rasyidin. Analisis dilakukan dalam tiga langkah: mengidentifikasi tantangan dan kebijakan tiap khalifah, membedakan fakta yang diriwayatkan dari penafsiran analitis, lalu menarik prinsip yang dapat dikontekstualisasikan pada pendidikan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan menerapkan analisis historis-pedagogis kritis. Pendekatan ini ditujukan untuk mengeksplorasi, menyintesis, dan membedah dinamika kebijakan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, sekaligus merekonstruksi relevansi konseptualnya terhadap problematika pendidikan Islam modern. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua: sumber primer berupa kitab sejarah dan hadis klasik (Shahih al-Bukhari, Al-Bidayah wa an-Nihayah, Tarikh al-Khulafa', dan Al-Muqaddimah), serta sumber sekunder yang mencakup buku-buku referensi sejarah pendidikan Islam

dan artikel jurnal ilmiah terakreditasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi dan mengategorisasi literatur yang relevan dengan fokus kajian. Proses filtrasi data berpusat pada penelusuran riwayat kebijakan publik, penataan pendidik, dan pengelolaan sumber belajar pada periode 632–661 M. Penelusuran Pustaka sekunder dilakukan melalui Portal Garuda, Moraref, Google Scholar, dan DOAJ dengan membatasi rentang tahun terbit artikel pada 2016-2026. Selanjutnya, analisis data dijalankan menggunakan teknik content analysis dan analisis deskriptif-kritis melalui tiga tahapan sistematis: mengidentifikasi tantangan dan kebijakan tiap khalifah, memisahkan fakta riwayat sejarah (historical narrative) dari penafsiran analitis penulis, serta menarik prinsip-prinsip pedagogis utama yang dapat dikontekstualisasikan pada pendidikan modern.

Guna menjaga keabsahan data dan objektivitas hasil kajian, penelitian ini menerapkan kritik sumber secara internal maupun eksternal terhadap literatur yang digunakan. Penulis menguji kekuatan narasi sejarah serta melakukan pembandingan silang (cross-checking) antar-sumber guna menghindari pembacaan anakronis yang memaksakan pola pendidikan klasik ke dalam struktur sekolah formal modern. Melalui tahapan metodologis ini, kesimpulan yang dirumuskan mampu memberikan kontribusi konseptual yang kokoh, rasional, dan aplikatif bagi pengembangan tata kelola serta kebijakan pendidikan Islam masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Pendidikan Islam pada Era Khulafaur Rasyidin

Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses membimbing manusia agar berkembang secara jasmani dan rohani menurut nilai-nilai Islam, sehingga terbentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Pada era Khulafaur Rasyidin, pengertian ini terwujud dalam praktik yang sederhana tetapi terarah: ajaran Islam dipelajari, dihafal, diamalkan, dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

Tujuan pendidikan pada masa itu berpusat pada penanaman akidah, ibadah, dan akhlak, serta pemeliharaan Al-Qur’an dan sunnah. Tujuan ini terkait langsung dengan kebutuhan umat, terutama setelah banyak orang baru memeluk Islam di wilayah taklukan. Mereka perlu diajari cara beribadah dan memahami kewajiban agama (Nata, 2022).

Sumber pendidikan adalah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw., yang kemudian diperkuat dengan ijtihad para sahabat dalam masalah baru. Materi pendidikan meliputi baca-tulis, Al-Qur’an dan tafsir sederhana, hadis, fikih dasar, ibadah, dan akhlak. Sebagian riwayat juga menyebut perhatian

pada keterampilan hidup seperti berenang dan berkuda, serta sastra dan syair Arab, meskipun penekanan utamanya tetap pada ilmu keislaman (Syamsuri, 2026).

Metode yang dominan adalah hafalan, talaqqi (belajar langsung dari guru), dan halaqah. Murid duduk melingkar mengelilingi guru, menyimak bacaan, lalu mengulanginya. Keteladanan juga menjadi metode penting, sebab para sahabat belajar dengan melihat cara hidup sahabat senior yang pernah bersama Rasulullah saw. (Faisal et al., 2024).

Semangat belajar dan mengajar pada masa itu bersumber dari teladan Nabi. Hadis riwayat al-Bukhari menyebut bahwa sebaik-baik orang ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya (Al-Bukhari, n.d.-c). Ibnu Khaldun kemudian mencatat bahwa pengajaran Al-Qur'an kepada anak menjadi ciri yang dianut kaum muslimin di berbagai kota dan menjadi dasar pengajaran berikutnya (Ibn Khaldun, 1989). Catatan ini ditulis berabad-abad setelah masa Khulafaur Rasyidin, sehingga lebih tepat dibaca sebagai gambaran tradisi yang mengendap, bukan laporan langsung tentang kebijakan para khalifah.

Tempat berlangsungnya pendidikan adalah masjid, rumah, dan kuttab. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, musyawarah, dan belajar sekaligus, sedangkan kuttab, tempat anak belajar membaca dan menulis, sudah dikenal sebelum Islam dan terus dimanfaatkan (Nata, 2022). Secara umum, pola pendidikan masa Khulafaur Rasyidin masih dekat dengan pola masa Nabi, ditambah perkembangan sesuai kebutuhan umat saat itu (Rachman & Widodo, 2023). Pendidikan pada masa ini belum berbentuk sekolah formal dengan jenjang dan kurikulum tertulis, tetapi ciri keteraturannya makin tampak seiring bertambahnya kebutuhan, terutama pada masa Umar bin Khattab.

Kebijakan Pendidikan pada Masa Para Khalifah

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq: Pemeliharaan Sumber Ajaran

Abu Bakar Ash-Shiddiq memimpin dalam situasi yang rawan. Wafatnya Rasulullah saw. diiringi munculnya kelompok yang menolak membayar zakat, orang-orang yang murtad, dan para pengaku nabi. Dalam kondisi ini, prioritas pendidikan adalah menjaga agar ajaran Islam tidak tercerabut dari pemeluknya (Abdullah, 2019). Pola pendidikan pada masa ini secara umum masih sama dengan masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaganya(Gultom, 2022). Karena itu, kontribusi Abu Bakar lebih tepat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan ajaran daripada perluasan kelembagaan yang besar.

Kebijakan paling menonjol di bidang pendidikan adalah pengumpulan Al-Qur'an. Pengumpulan Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan pentingnya

menjaga sumber utama pendidikan Islam agar tetap terpelihara. Namun, secara kritis, terpeliharanya sumber ilmu belum tentu menjamin bahwa ilmu tersebut dipahami dan diterapkan secara tepat. Dalam konteks pendidikan modern, ketersediaan buku, Al-Qur'an, dan sumber belajar lainnya perlu diimbangi dengan kemampuan pendidik dalam menjelaskan isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, upaya menjaga sumber ilmu harus disertai dengan proses pembelajaran yang mendorong pemahaman, penghayatan, dan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah ini sejalan dengan peringatan Nabi bahwa ilmu dicabut melalui wafatnya para ulama (Al-Bukhari, n.d.-a). Ketika para penghafal gugur di Yamamah, risiko hilangnya sumber belajar menjadi nyata, dan pencatatan dalam satu naskah menjadi jawaban kelembagaan yang paling masuk akal. sama-sama mencatat kodifikasi ini sebagai kontribusi pendidikan Abu Bakar. Kaitan antara hadis tersebut dan keputusan Abu Bakar adalah tafsir penulis, sebab riwayat pengumpulan mushaf tidak menyebutnya sebagai alasan.

Masjid dan halaqah tetap menjadi pusat pembelajaran. Madinah menjadi pusat pendidikan dengan para sahabat Nabi sebagai tenaga pendidiknya (Suryani & Dewi, 2024), dan para sahabat senior mengajarkan Al-Qur'an serta hukum-hukum agama kepada yang lebih muda. Keberlanjutan pendidikan terjaga melalui peran sahabat sebagai guru dan rujukan, sementara kepemimpinan Abu Bakar yang tegas menjaga stabilitas yang memungkinkan kegiatan belajar terus berjalan.

Nilai yang dapat diambil dari masa Abu Bakar adalah kehati-hatian dalam menjaga sumber ajaran dan keberanian mengambil kebijakan baru yang tidak bertentangan dengan prinsip agama ketika kebutuhan menuntutnya. Dua sikap ini, menjaga yang pokok dan fleksibel dalam sarana, menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan pendidikan.

2. Umar bin Khattab: Penataan dan Pemerataan Pendidik

Masa Umar bin Khattab ditandai perluasan wilayah yang pesat, meliputi Syam, Irak, Persia, dan Mesir (Abdullah, 2019). Perluasan ini membawa konsekuensi pendidikan yang nyata. Penduduk wilayah baru memerlukan pengajaran dasar Islam, sedangkan para sahabat yang menguasai Al-Qur'an dan hadis masih terpusat di Madinah. Tanpa kebijakan khusus, kesenjangan pemahaman antara pusat dan daerah akan melebar.

Umar menanggapinya dengan mengirim para sahabat ke berbagai daerah sebagai guru. Dalam literatur sejarah pendidikan Islam disebutkan nama-nama seperti Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Ash-Shamit, dan Abu Darda yang ditugaskan ke Syam, serta Abdullah bin Mas'ud yang berperan di Kufah (Nata, 2022). Dari sini terlihat pola yang terencana: guru dipilih dari kalangan yang dikenal menguasai ilmu, ditempatkan di wilayah yang membutuhkan, dan diberi tugas mengajar masyarakat

setempat.

(Dahlan et al., 2023) menyimpulkan bahwa pendidikan pada masa Umar bin Khattab mengandung prinsip kesetaraan dan memperoleh dukungan pembiayaan dari negara. Namun, kesimpulan tersebut perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan sumber dan riwayat sejarah yang digunakan. Oleh karena itu, dukungan negara terhadap kegiatan pengajaran pada masa Umar dapat dibahas sebagai indikasi perhatian pemerintah terhadap pendidikan, tetapi cakupan, mekanisme, dan bentuk pembiayaannya masih memerlukan bukti historis yang lebih kuat.

Masjid dikembangkan sebagai pusat pendidikan di kota-kota yang baru berkembang seperti Kufah, Basrah, dan Fustat, tempat masjid menjadi pusat ibadah sekaligus tempat belajar Al-Qur'an dan agama (Talib, 2022). Perhatian Umar pada kemampuan membaca Al-Qur'an, hadis, dan ilmu dasar keislaman tampak dalam penekanan agar masyarakat memahami ajaran pokok agama. Sebagian riwayat juga menisbatkan kepadanya anjuran agar anak-anak diajari keterampilan seperti berenang dan menunggang kuda. Riwayat ini perlu dibaca hati-hati karena kekuatan sanadnya diperdebatkan, sehingga lebih tepat dipandang sebagai gambaran kecenderungan pendidikan masa itu daripada kebijakan resmi yang pasti.

Dari segi pengelolaan, pola pendidikan pada masa Umar tergolong lebih tertata dan lebih luas dibanding masa sebelumnya (Gultom, 2022). Pembentukan administrasi negara, seperti baitul mal, dewan-dewan, dan penunjukan hakim, memberi ruang bagi pengaturan pendidik dan pelaksana tugas keagamaan (Suryani & Dewi, 2024). Beberapa sumber menyebut guru memperoleh gaji dari baitul mal. Namun rincian besaran dan pelaksanaannya tidak seragam di berbagai literatur, sehingga di sini cukup disimpulkan bahwa ada kecenderungan negara memberi perhatian pada kesejahteraan pendidik.

Kebijakan Umar menunjukkan tiga nilai kepemimpinan: kemampuan membaca kebutuhan lapangan, kesediaan membagi sumber daya manusia terbaik ke daerah yang membutuhkan, dan perhatian pada penataan, bukan sekadar semangat. Pelajaran ini sangat dekat dengan persoalan pemerataan guru berkualitas hari ini.

3. Utsman bin Affan: Standardisasi Sumber Belajar

Pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas, dan umat Islam dari berbagai daerah serta latar bahasa bertemu dalam pasukan maupun masyarakat. Perbedaan cara membaca Al-Qur'an mulai menimbulkan perselisihan. Dalam riwayat al-Bukhari, Hudzaifah bin al-Yaman, yang melihat perbedaan bacaan ketika ikut berperang di Armenia dan Azerbaijan, menyampaikan kekhawatirannya kepada Utsman agar umat tidak berselisih tentang kitab mereka seperti Yahudi dan Nasrani (Al-

Bukhari, n.d.).

Utsman kemudian membentuk tim yang diketuai Zaid bin Tsabit, bersama Abdullah bin az-Zubair, Sa'id bin al-'Ash, dan Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, untuk menyalin mushaf yang disimpan Hafshah. Panduan yang diberikan adalah bila terjadi perbedaan, penulisan mengikuti dialek Quraisy, sebab Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka. Salinan mushaf dikirim ke sejumlah wilayah, sementara bahan atau salinan Al-Qur'an lainnya diperintahkan untuk dibakar (Al-Bukhari, n.d.-b; Ibnu Katsir, n.d.).

Dampak pendidikan dari kebijakan ini sangat besar. Pertama, tersedia rujukan baku yang menjadi pegangan guru dan murid di berbagai wilayah. Kedua, perselisihan mengenai teks dasar dapat diredam sehingga proses belajar tidak terpecah oleh persoalan kitab induk. Ketiga, kebijakan ini mencerminkan pemerataan sumber belajar, karena pusat-pusat wilayah mendapat salinan yang sama. Pengiriman salinan mushaf adalah fakta yang diriwayatkan, sedangkan sebutan "standardisasi sumber belajar" adalah penafsiran analitis penulis.

Perlu dicermati bahwa kebijakan mushaf bermula dari kekhawatiran akan perselisihan umat, bukan dari program pendidikan yang dirancang lebih dulu. Dampak pendidikannya adalah akibat yang kemudian terasa dan ditafsirkan oleh para penulis belakangan (Al-Bukhari, t.t., hadis no. 4987; Toedien dkk., 2025). Pembacaan ini menjaga agar kebijakan Utsman tidak dibesar-besarkan sebagai sistem pendidikan, sekaligus tidak dikecilkan karena akibatnya bagi pembelajaran sangat luas.

Masjid dan para sahabat tetap menjadi penggerak pembelajaran. Pada masa Utsman, sahabat senior yang sebelumnya terpusat di Madinah diberi kelonggaran untuk menetap di daerah-daerah lain, dan kebijakan ini berdampak pada pelaksanaan pendidikan di berbagai wilayah (Suryani & Dewi, 2024). Namun pembahasan tentang perkembangan kelembagaan pendidikan pada masa ini lebih terbatas dibanding masa Umar, dan pendidikan lebih banyak melanjutkan yang sudah ada. Karena itu, kontribusi paling menonjol Utsman tetap pada pemeliharaan dan penyeragaman sumber belajar. Nilai pentingnya adalah bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup dengan menyebar guru, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keseragaman rujukan.

4. Ali bin Abi Thalib: Ketahanan Tradisi Ilmu di Tengah Konflik

Masa Ali bin Abi Thalib berlangsung dalam suasana politik yang tidak stabil. Setelah terbunuhnya Utsman, terjadi perselisihan yang berlanjut pada Perang Jamal dan Perang Shiffin, dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah (Tobi & Sarkawi, 2025). Sejumlah kajian menilai bahwa kondisi ini membuat pendidikan tidak berkembang pesat karena perhatian khalifah tertuju pada keamanan dan upaya mempersatukan umat (Suryani & Dewi, 2024). Dengan demikian, ruang

pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan baru secara sistematis sangat terbatas.

Meskipun demikian, kegiatan keilmuan tidak berhenti. Ali dikenal sebagai sahabat yang luas ilmunya, terutama dalam bidang hukum dan pemahaman agama, serta banyak dikutip dalam literatur pendidikan Islam karena ungkapan-ungkapannya tentang ilmu (Nata, 2022). Para sahabat dan ulama di berbagai kota, seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, terus mengajar sehingga halaqah-halaqah ilmu tumbuh di Makkah, Madinah, Kufah, dan Basrah.

Salah satu contoh yang sering disebut dalam tradisi keilmuan adalah dorongan pada penyusunan kaidah bahasa Arab. Menurut tradisi yang masyhur, Abu al-Aswad ad-Du'ali merintis ilmu nahwu atas arahan Ali bin Abi Thalib karena meluasnya kesalahan membaca bahasa Arab di kalangan non-Arab. Riwayat ini banyak dikutip dalam buku sejarah pendidikan, tetapi rincian peristiwanya berasal dari tradisi periwayatan yang tidak seragam, sehingga sebaiknya disebut sebagai tradisi, bukan kepastian sejarah.

Pelajaran dari masa Ali ialah bahwa pendidikan dapat bertahan di tengah konflik jika ditopang masyarakat ilmu yang kuat. Ketika kekuatan negara terbatas, peran ulama dan sahabat sebagai penjaga tradisi belajar menjadi sangat menentukan. Nilai lain adalah penekanan pada keseimbangan ilmu, adab, dan amal sebagaimana tercermin dalam nasihat-nasihat yang dinisbatkan kepada beliau.

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan pendidikan pada masa masing-masing khalifah, terdapat perbedaan fokus yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan kondisi zamannya. Perbandingan tersebut dirangkum dalam Tabel untuk memperjelas karakteristik kebijakan serta nilai pendidikan yang dapat dipetik dari setiap periode.

Tabel 1. *Matriks Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Khulafaur Rasyidin dan Kontekstualisasi Modern*

Khalifah	Problematika Historis Riil	Kebijakan Pendidikan yang Diterapkan	Prinsip Pedagogis/Nilai Inti	Kontekstualisasi pada Kebijakan Pendidikan Modern
Abu Bakar Ash-Shiddiq	Gugurnya puluhan huffazh di perang Yamamah; ancaman disintegrasi	Kodifikasi lembaran Al-Qur'an menjadi satu naskah (jam'ul Qur'an) melalui Zaid bin Tsabit.	Penyelamatan dan pemeliharaan sumber primer keilmuan (preservation).	Penjaminan integritas kurikulum inti dan perlindungan validitas sumber belajar digital.

	pasca-wafatnya Nabi.			
Umar bin Khattab	Ekspansi massif; disparitas pemahaman agama antara Madinah dan daerah taklukan baru.	Mobilisasi sahabat senior sebagai guru ke Syam, Kufah, dan Basrah; dukungan insentif dari Baitul Mal (rincian tidak seragam dalam literatur).	Tata kelola, pemerataan akses, dan apresiasi profesi pendidik.	Kebijakan distribusi guru ke daerah 3T dan pemenuhan hak kesejahteraan guru profesional (UU nomor 14/2005).
Utsman bin Affan	Perselisihan dialek bacaan Al-Qur'an di kalangan prajurit lintas etnis (Armenia-Azerbaijan).	Standardisasi mushaf Utsmani berdialek Quraisy; distribusi salinan resmi ke pusat-pusat wilayah.	Standardisasi rujukan belajar dan integrasi mutu nasional.	Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta kurasi buku teks/modul digital nasional.
Ali bin Abi Thalib	Turbulensi politik perang saudara (Jamal dan Shiffin); ancaman kerusakan tata bahasa Arab.	Pemeliharaan majelis keilmuan (halaqah); dorongan penyusunan kaidah bahasa Arab (nahwu) menurut tradisi yang masyhur.	Ketahanan tradisi ilmiah (academic resilience) dan literasi dasar.	Menjaga netralitas dan kontinuitas ekosistem pendidikan di tengah krisis sosial-politik; penguatan literasi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pemeliharaan sumber ajaran, penataan pendidik, standardisasi sumber belajar, dan keberlanjutan tradisi keilmuan merupakan aspek penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dapat dikaji relevansinya dengan kebutuhan pendidikan modern.

Relevansi Kebijakan Pendidikan Islam Era Khulafaur Rasyidin dengan Pendidikan Modern

Relevansi yang dimaksud di sini bukan berarti sistem pendidikan masa lalu diterapkan persis pada masa sekarang. Konteksnya jelas berbeda: masyarakat kini jauh lebih kompleks, ilmu berkembang dalam banyak cabang, dan pendidikan dikelola melalui sistem formal. Yang layak diambil adalah prinsip dan nilainya, yang kemudian diterjemahkan sesuai kebutuhan zaman. Berikut beberapa aspek yang dapat dihubungkan.

Pijakan kebijakan nasional memperkuat relevansi ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan tujuan pendidikan yang mencakup keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia di samping kecakapan dan kemandirian peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai kompetensi guru. Rumusan-rumusan ini bertemu dengan prinsip masa Khulafaur Rasyidin tentang kesatuan ilmu dan akhlak serta tentang pendidik yang dipilih karena penguasaan ilmunya.

Pendidikan berbasis nilai dan akhlak. Pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak memisahkan ilmu dari akhlak, karena belajar dipahami sebagai bagian dari pembentukan pribadi. Suryani dan Dewi (2024) menyebut kepemimpinan berbasis nilai Islam, pendidikan holistik, dan pengembangan kepribadian Islami sebagai sumbangan masa itu bagi pendidikan di era globalisasi. Dalam pendidikan modern, prinsip ini relevan untuk penguatan pendidikan karakter. Contohnya, madrasah dan sekolah dapat menjadikan pembiasaan salat berjamaah, kejujuran dalam ujian, dan adab terhadap guru sebagai bagian dari penilaian proses, bukan hanya nilai akademik.

Pemerataan akses pendidikan. Pengiriman guru oleh Umar bin Khattab ke wilayah-wilayah baru dapat dibaca sebagai upaya menjangkau daerah yang belum terlayani. Di Indonesia, persoalan serupa tampak pada ketimpangan antara sekolah di kota dan di daerah terpencil. Prinsipnya relevan untuk program penempatan guru di daerah 3T yang disertai dukungan layak, bukan sekadar penugasan.

Profesionalisme dan kompetensi pendidik. Guru yang dikirim ke daerah pada masa itu dipilih dari sahabat yang dikenal menguasai ilmu. Pelajarannya, pendidik harus memiliki kompetensi yang jelas. Dalam konteks modern, hal ini berarti seleksi, pelatihan berkelanjutan, dan sertifikasi yang benar-benar meningkatkan mutu pengajaran, bukan hanya formalitas administratif.

Pengelolaan pendidikan yang terencana. Penataan administrasi pada masa Umar menunjukkan bahwa pendidikan berjalan lebih baik bila dikelola, bukan dibiarkan berjalan sendiri. Kini hal ini terwujud dalam perencanaan kurikulum, pemetaan kebutuhan guru, dan evaluasi

kebijakan berbasis data.

Pengembangan sumber belajar dan literasi. Pengumpulan dan penyeragaman mushaf menunjukkan perhatian serius pada kualitas sumber belajar. Prinsip ini dapat diterapkan dengan memastikan buku ajar, modul, dan konten digital terjamin akurasinya. Contohnya, sekolah dapat mengkurasi sumber belajar keislaman digital agar siswa tidak bergantung pada konten yang tidak jelas rujukannya. Dalam kaitannya dengan literasi, tradisi baca-tulis Al-Qur'an dapat dikembangkan menjadi literasi yang lebih luas, yaitu kemampuan membaca, memahami, dan menilai informasi.

Pendidikan yang adaptif dan integrasi ilmu. Para khalifah menjawab perubahan sosial dengan kebijakan baru tanpa meninggalkan prinsip. Sikap adaptif ini penting bagi pendidikan modern yang menghadapi perubahan cepat. Dalam hal integrasi ilmu agama dan ilmu umum, masa Khulafaur Rasyidin belum mengenal pemisahan tajam seperti yang muncul belakangan; ilmu dipandang sebagai satu kesatuan yang melayani kehidupan beragama dan bermasyarakat (Azra, 2019). Ini dapat menginspirasi pembelajaran yang mengaitkan sains dengan nilai Islam, misalnya pembelajaran lingkungan yang dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Kepemimpinan dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan mushaf dan pengiriman guru lahir dari pemimpin yang peka dan berani memutuskan. Kepala sekolah, pimpinan madrasah, dan pembuat kebijakan memerlukan kualitas serupa: membaca kebutuhan, mengambil keputusan tepat waktu, dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pemanfaatan teknologi. Penulisan dan penyalinan mushaf adalah pemanfaatan sarana pada zamannya untuk menjaga ilmu. Dengan logika yang sama, teknologi digital seperti aplikasi belajar Al-Qur'an, kelas daring, dan perpustakaan digital dapat dimanfaatkan, selama kontennya dijaga keabsahannya dan penggunaannya tidak menggeser adab belajar. Analisis ini bersifat penafsiran penulis, bukan klaim bahwa para khalifah memiliki konsep teknologi pendidikan.

Meskipun kebijakan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki nilai yang relevan bagi pendidikan modern, penerapannya tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi zaman. Pendidikan pada masa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan modern yang menggunakan kurikulum formal, jenjang pendidikan, teknologi, dan sistem administrasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, hal yang perlu diambil bukanlah meniru seluruh bentuk pelaksanaan pendidikan pada masa lalu, melainkan mengadaptasi prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti menjaga sumber ilmu, memeratakan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas pendidik, dan mempertahankan nilai-nilai keislaman. Adaptasi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan

pendidikan masa kini.

SIMPULAN

Pendidikan Islam pada era Khulafaur Rasyidin berkembang melalui kebijakan yang menjawab tantangan zamannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq menjaga sumber ajaran melalui pengumpulan Al-Qur'an. Umar bin Khattab menata dan menyebarkan pendidikan lewat pengiriman guru dan penguatan masjid. Utsman bin Affan memastikan keseragaman sumber belajar melalui penyalinan mushaf. Ali bin Abi Thalib, di tengah konflik politik, menjadi bagian dari masa ketika tradisi keilmuan tetap dijaga oleh para sahabat dan ulama.

Dari keempatnya dapat dirumuskan prinsip yang masih relevan, yakni pemeliharaan sumber belajar, pemerataan dan profesionalisme pendidik, standardisasi mutu, kepemimpinan yang peka terhadap kebutuhan, serta ketahanan tradisi ilmu. Prinsip tersebut dapat dikembangkan dalam pendidikan modern, baik untuk penguatan karakter, pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, maupun pemanfaatan teknologi, selama diterapkan sebagai nilai dan bukan sebagai penyalinan bentuk lama.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada literatur dan riwayat yang sebagian ditulis jauh setelah peristiwanya, serta tidak melakukan takhrij hadis secara mandiri. Karena itu, kesimpulan dirumuskan pada tingkat prinsip, dan rincian yang masih diperdebatkan sengaja tidak dijadikan dasar rekomendasi.

Sebagai saran praktis, bagi lembaga pendidikan Islam, nilai-nilai pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, seperti pembinaan guru dan penjaminan mutu sumber belajar. Bagi mahasiswa dan peneliti, kajian lanjutan dapat memperdalam salah satu aspek, misalnya pengelolaan pendidik pada masa Umar bin Khattab, dengan menggunakan sumber primer dan jurnal ilmiah yang lebih beragam. Bagi pembuat kebijakan, pengalaman Khulafaur Rasyidin mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang baik lahir dari pembacaan kebutuhan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. M. N. (2019). *Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*. Pustaka Al-Kautsar.

Al-Bukhari. (n.d.-a). *Sahih al-Bukhari 100*. https://sunnah.com/bukhari:100

Al-Bukhari. (n.d.-b). *Sahih al-Bukhari 4987*. https://sunnah.com/bukhari:4987

Al-Bukhari. (n.d.-c). *Sahih al-Bukhari 5027*. https://sunnah.com/bukhari:5027

Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media.

Dahlan, Z., Lingga, S. A.-F., & Assingkily, M. S. (2023). Islamic Education In The Time of Kalifah Umar Bin Khattab and Its Relevance To Education In The Contemporary Era. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(01). https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4014

Faisal, M., Pd, M. M., Masruri, M. P. I., Sobirin, S. P. I., Pd, M., Supriyanto, N., Wiranti, S. H., & Roziqin, A. C. (2024). *Sejarah Pendidikan Islam*. Mega Press Nusantara.

Gultom, A. N. (2022). Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, *6*(2), 167–180. https://doi.org/10.47006/er.v6i2.13159

Ibn Khaldun. (1989). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press.

Kosim, M. (2021). Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin dan perannya dalam pengembangan pendidikan Islam. *Jurnal Kawakib*, 78–89. https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.25

Mulyani, A., Tabroni, I., Agustina, T. N. U., Wei, Z., & Xu, S. (2023). Islam's Classical Period: Examining the Great Contribution of the Khulafahur Rashidin. *International Journal of Educational Narratives*, *1*(4), 219–233.

Nata, H. A. (2022). *Membangun Pendidikan Islam Yang Unggul Dan Bedraga Saing Tinggi: Seri Kajian: Analisis Kebijakan Dan Kapita Selekta Pendidikan Islam Di Indonesia*. Prenada Media.

Rachman, U., & Widodo, A. (2023). Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin dan kontekstualisasinya pada pendidikan Islam masa kini. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, *4*(1), 250–259.

Rauf, A., Wahyuni, A. D., & Umam, Z. (2025). *Refleksi Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam (Masa Klasik Dan Khulafaur Rasyidin)*. Penerbit Kbm Indonesia.

Shohibatussholihah, F. (2022). Khulafa Ar Rasyidin and the Islamic Education System. *Abjadia: International Journal of Education*, *7*(2), 201–213.

Suryani, I., & Dewi, E. (2024). Menguatkan arah pendidikan Islam era globalisasi: Menginternalisasi nilai pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, *9*(1), 123–139. https://doi.org/10.25299/althariqah.v9i1.16782

Syamsuri, S. (2026). Konsep Dasar Sejarah Pendidikan Islam: Kajian Konseptual. *KREATIF Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, *24*(1), 293–300.

Talib, U. (2022). The Pioneers of Islamic Education: A Critical Look at the Khulafaurrasyidin Period. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, *10*(2), 93–111.

Tobi, A., & Sarkawi, N. I. M. (2025). *Spektrum Sejarah Masa Klasik: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Khulafaur Rasyidin*. PENERBIT KBM INDONESIA.

Toedien, F. A., Dewi, E., & Sutarmo, S. (2025). Reconstructing the Pattern of Islamic Education during the al-Khulafāʾ al-Rāsyidūn Period and Its Relevance to the Indonesian Educational Context. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, *4*(1), 57–74. https://doi.org/10.51214/biis.v4i1.1414

Zebua, R. S. Y., Ihsan, M., & Nurjanah, N. (2020). Perkembangan pendidikan Islam pada periode Khulafāur Rāsyidīn dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, *5*(1), 115–126.